Resume hukum tata Negara

NAMA: ABD HAPID

NIM: 10200120256

Pokok materi:

1. Istilah hukum tata Negara
2. Sumber-sumber hukum tata Negara
3. Asas-asas hukum
4. Sejarah ketatanegaraan indonesia
5. Konstitusi
6. Organ dan fungsi kekuasaan Negara

A. istilah hukum tata Negara

Pada masa lalu, istilah "hukum tata Negara" sangat jarang sekali terdengar apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmiah. hukum tata Negara yang di pelajari oleh mahasiswa adalah hukum tata negara arti sempit. Hal ini di pengaruhi oleh watak rezim ordebaru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu yang memang menggantungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. pemikiran hukum tata Negara secara langsung maupun tidak langsung akhirnya menjadi terhegenoni/terbelenggu. Tatanan ketatanegaraan berdasarkan hukum tata Negara pada saat itu adalah pelaksanaan dari pancasila dan UUD 1945. Secara murni dengan memberlakukan asas tunggal asas tunggal penerapan P4((pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila). akibatnya, pembahasan sisi teoritis dari hukum tata Negara menjadi ditinggalkan. Bahkan dikekang karena dianggap sebagai pikiran yang "arti kemampuan" dan dapat mengganggu stabilitas nasional. hukum tata Negara juga dibedakan antara hukum tata Negara membahas asas-asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum tata Negara positif hanya membahas hukum tata Negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. misalnya, hukum tata negara indonesia, hukum tata Negara inggris, ataupun hukum tata Negara amerika serikat yang dewasa ini berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan dan merupakan hukum tata Negara positif.

Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara.

Di belanda umumnya memakai istilah "staatsrech" yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engerer zin (dalam arti sempit). staatsrech in ruimere zin adalah hukum Negara. Sedangkan staatsrech in

ereinge zin adalah hukum yang membedakan hykum tata Negara hukum adminidrasi Negara. Hukum tatauusaha negara atau hukum tata pemerintah.

Di inggris pada umumnya memakai istilah "contusional law", penggunaan istilah tersebut di dasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol.

Di prancis orang mempergunakan istilah "droit constitunional" yang di lawankan dengan "droit administrative" dimana titik toalnya adalah untuk membedakan antara hukum tata Negara engan hukum admidrasi negara.

B. Sumer-sumber hukum tata Negara

1. Undang - Undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis

Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang berlaku di negara.hukum ini tidak mengatur hal- hal yang terperinci melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar peraturan-praturan lainnya .Undang –undang dasar merupakan naskah konstitusi yang tertulis dalam satu kodifikasi.

Indonesia memiliki Undang - Undang dasar 1945 sebagai hukum dasar,yang mana sebelumnya pernah berubah – ubah. Pertama naskahnya pernah berupa UUD 1945 periode pertama dari tahun 1945 sampai 1949. Periode kedua konstitusi RIS tahun 1949. Ketiga,UUDS 1950 .keempat, UUD 1945 periode kedua tahun 1959 sampai 1999. Kelima, UUD 1945 periode ketiga tahun 1999 sampai 2000. Keenam, UUD 1945 periode keempat tahun 2000 sampai 2001. Ketujuh, UUD 1945 periode kelima tahun 2001-2002 dan terakhir UUD 1945 periode keenam tahun 2002 sampai sekarang.

2. Yurisprudensi peradilan

Istilah yurisprudensi,berasal bahasa latin,yaitu dari kata "jurisprudencia" yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sam artinya dengan kata " jurisprudentia" dalam bahasa belanda dan "jurisprudence" dalam bahasa prancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. (purnadi purbacaraka, dkk, 1995 : 121).Dalam kamus besar bahasa indonesia (2001:1278) kata yudisprudensi diartikan : ajaran hukum melalui peradilan; himpunan putusan hakim.

3. Konvensi ketatanegaraan

Konvensi – konvensi ketatanegaraan (konventions of the constution) yang berlaku dan dihormati dan kehidupan ketatanegaraan, walaupun tak dapat dipaksakan oleh pengadilan apabila terjadi pelanggaran harus memenuhi ciri – ciri sebagai berikut:

- Konvensi itu berkenan dengan hal – hal dalam bidang ketatanegaraan.

- Konvensi tubuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan Negara.
- Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada penyelenggaraan terhadapnya dan dapat diadili oleh badan pengadilan.

4. hukum internasional

hukum publik internasional secara umum dianggap menjadi sumber hukum tata Negara. meskipun sama – sama menjadikan negara selaku subyek kajiannya, antara hukum tata Negara dengan hukum internasional public jelas dapat dibedakan satu sama lainnya. Hukum tata Negara dari segi internalnya, sedangkan hukum internasional melibatkan negara dari hubungan eksternalnya dengan subyek – subyek negara lain, contohnya:

- ❖ konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatic.
- ❖ Konvensi wina 1969 tentang hubungan konsuler.
- ❖ Konvensi new york 1969 tentang misi khusus.
- ❖ Konvensi wina 1975 tentang perwakilan negara pada organisasi internasional.

5. Doktrin ilmu hukum tata Negara.

doktrin kobar yaitu mengenai kesepakatan 5 negara yang tidak mengakui pemerintahan hasil pemberontak atau perebutan kekuasaan dan hanya akan mengakui apabila secara konstitusionalitas negara terpenuhi. arti meski pernah itu efektif memegang kekuasaan, pengakuan harus ditanggguhkan sampai rakyat di Negara itu melalui suatu pemilu yang bebas telah menyatakan sikapnya terhadap pemerintahan baru tersebut. Doktrin ini di setuju presiden AS woordrow yang berbeda dengan presiden jefferson dengan de facto isme sejak 1913.

C. Asas – Asas Hukum Tata Negara

1. Asas Pancasila

Bangsa indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar negara adalah pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran pancasila.

Dalam bidang hukum pancasila merupakan sumber hukum materil, sehingga setiap isi peraturan perundang – undangan tidak boleh bertentangan dengan sila – sila yang terkandung dalam pancasila.

Undang – Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstutional daripada Negara Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat Pokok-Pokok pikiran yang merupakan cita – cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum Dasar Negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

Pokok – Pokok pikiran yang merupakan pandangan hidup bangsa adalah:

- ✓ Pokok pikiran pertama “Negara”
- ✓ Pokok pikiran kedua “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”
- ✓ Pokok pikiran ketiga “Negara yang berkedaulatan rakyat”
- ✓ Pokok pikiran keempat “negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dan beradap”

2. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemenkan, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945.

Unsur – Unsur / Ciri - Ciri khas daripada suatu negara hukum atau *Rechtsstaat* adalah:

- ❖ Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
- ❖ Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- ❖ Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
- ❖ Adanya Undang – Undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- ❖ Adanya pembagian kekuasaan Negara.

3. Asas Negara Kesatuan

Pada dasarnya Negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/memproklamkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu Negara.

D. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk BPUPKI yang

telah berhasil membayar rancangan dasar negara pada tanggal 25 mei s.d juni 1945 dan rancangan UU dasar pada tanggal 10 juli s.d 17 juli 1945

Pada tanggal 11 agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang melanjutkan upaya – upaya yang telah dilakukan oleh PPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang melalui diberlakukan tanggal 18 agustus 1945, maka hal – hal yang dilakukan adalah :

- Menerapkan UUD Negara RI pada tanggal 17 agustus 1945
- Menerapkan Soekarno-Departemen oleh Presiden
- Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden
- Pengangkatan anggota KNIP oleh Presiden
- Pembentukan delapan propinsi oleh PPKI

2. Periode konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950.

Setelah indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan kerajaan belanda, dengan alasan:

- Ketentuan hukum internasional

Menurut hukum internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia – Belanda yang diduduki oleh bala tentara jepang masih merupakan bagian dari kerajaan belanda, oleh karena itu setelah jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia – belanda adalah kerajaan belanda sebagai pemilik/penguasa semula.

- Perjanjian postdam

Yaitu perjanjian diadakan menjelang berakhirnya perang dunia II yang diadakan oleh Negara sekutu dengan pihak jepang, italia dan jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah perang dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula

3. Periode 17 Agustus 1950 s.d juli 1959

Pada masa konstitusi RIS, Negara – Negara bagian makin sulit diatur dan kewajiban pemerintah Negara federasi semakin berkurang sedangkan indonesia sendiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat – istiadat, pulau – pulau dan bahasa, maka rakyat di daerah – daerah sepakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

4. Periode 17 juli 1959 s.d 1966

Periode ini biasa disebut juga Era Orde Lama dengan “Demokrasi Terpimpin” konsep demokrasi terpimpin dari bung karno diterima sebagai dasar

penyelenggaraan Negara yang ditetapkan dalam TAP MPRS No VIII/1965.

Demokrasi terpimpin adalah musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka persoalan ini diserahkan pada pimpinan untuk mengambil keputusan.

Atas dasar demokrasi terpimpin semua bidang dalam ketatanegaraan sebagai terpimpin.

5. Periode Orde Baru

Atas dasar surat 11 maret 1966 (SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya presiden soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh jenderal soeharto.

Dalam kepemimpinan jenderal soeharto penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada kestabilan politik dan keamanan Negara.

E. Konstitusi

➤ Pengertian konstitusi

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan – aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan Negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi, konstitusi bagi organisasi pemerintahan Negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya.

➤ Fungsi dan maksud konstitusi

Menurut C.F. trong prinsipnya berfungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak – hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

o Fungsi konstitusi secara umum

- Konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu Negara
- Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi
- Konstitusi berfungsi sebagai alat membatasi kekuasaan
- Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambing
- Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan bangsa suatu Negara
- Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi

kesewenang – wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak – hak bagi warga Negara dapat terlindungi dan tersalurkan.

► **Nilai – Nilai konstitusi**

Nilai konstitusi yaitu:

1. Nilai Normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi ini tidak berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen.
2. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetapi berlaku, tetapi tidak sempurna, ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah Negara.
3. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

F. Organ Dan Fungsi Kekuasaan Negara

• **Fungsi – Fungsi kekuasaan**

salah satu ciri Negara hukum, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan Negara terpusat dan terkonsentrasi ditangan satu orang. Yaitu di tangan raja atau ratu yang memimpin Negara secara turun temurun.

1. Fungsi pengaturan (legislatif)

Fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- Prakarsa pembuatan undang – undang
- Pembahasan rancangan undang – undang
- Persetujuan atas pengesahan rancangan undang – undang
- Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen – dokumen hukum yang mengikat lainnya.

2. Fungsi pengawasan

Secara teoritis, fungsi – fungsi control atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:

- ❖ Pengawasan terhadap penentuan kebijakan
- ❖ Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
- ❖ Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja Negara
- ❖ Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja Negara
- ❖ Pengawasan terhadap kinerja pemerintah
- ❖ Pengawasan terhadap pejabat public dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR

3. Fungsi perwakilan (Representasi)

fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang paling pokok sebenarnya adalah fungsi representasi atau perwakilan rakyat yang perwakilan itu tiga sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai Negara demokrasi. Ketiga fungsi itu adalah:

- Sistem perwakilan politik, menghasilkan wakil – wakil politik
- Sistem perwakilan teritorial, menghasilkan wakil – wakil daerah
- Sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil – wakil golongan fungsional

4. Fungsi Deliberatif Dan Resolusi Konflik

Dalam setiap pembuatan aturan, selalu dilakukan pembahasan, baik antar anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting yang bisa dimiliki oleh lembaga perwakilan.